

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023**

5.02.0.00.0.00.02. - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URAIAN	REF	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	67.000.000,00	120.638.100,00	180,06	61.392.300,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	16.660.733.802,00	10.967.609.930,00	65,83	14.112.352.048,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	24.403.500.000,00	7.987.128.458,13	32,73	12.995.139.151,65
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>41.131.233.802,00</b>	<b>19.075.376.488,13</b>	<b>46,38</b>	<b>27.168.883.499,65</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	71.475.682.000,00	84.294.507.000,00	117,93	83.168.162.473,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	170.904.608.000,00	239.685.693.000,00	140,25	214.404.530.490,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	1.021.515.931.000,00	919.817.829.148,00	90,04	925.026.162.597,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	350.376.563.000,00	310.083.135.457,00	88,50	320.731.403.822,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>1.614.272.784.000,00</b>	<b>1.553.881.164.605,00</b>	<b>96,26</b>	<b>1.543.330.259.382,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>					
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	191.163.118.000,00	186.238.341.500,00	97,42	192.085.204.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>191.163.118.000,00</b>	<b>186.238.341.500,00</b>	<b>97,42</b>	<b>192.085.204.000,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.2.3.1	129.736.132.606,00	104.063.293.300,00	80,21	151.951.510.090,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.2	-	-	-	-
Pendapatan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.3	13.232.000.000,00	6.506.703.000,00	49,17	15.587.916.000,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>142.968.132.606,00</b>	<b>110.569.996.300,00</b>	<b>77,34</b>	<b>167.539.426.090,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>1.948.404.034.606,00</b>	<b>1.850.689.502.405,00</b>	<b>94,98</b>	<b>1.902.954.889.472,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	-	-
Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	-	-	-	-
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.989.535.268.408,00</b>	<b>1.869.764.878.893,13</b>	<b>93,98</b>	<b>1.930.123.772.971,65</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	10.211.004.027,00	8.684.066.491,00	85,05	7.910.046.779,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	18.881.073.950,00	14.658.703.653,00	77,64	12.413.052.119,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	-	-	-	-
Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>29.092.077.977,00</b>	<b>23.342.770.144,00</b>	<b>80,24</b>	<b>20.323.098.898,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	1.580.000.000,00	1.507.355.000,00		802.972.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	-	-		540.841.018,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>1.580.000.000,00</b>	<b>1.507.355.000,00</b>	<b>95,40</b>	<b>1.343.813.018,00</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	2.669.459.229,00	1.157.985.156,00	43,38	183.454.962,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>2.669.459.229,00</b>	<b>1.157.985.156,00</b>	<b>43,38</b>	<b>183.454.962,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>33.341.537.206,00</b>	<b>26.008.110.300,00</b>	<b>78,01</b>	<b>21.850.366.878,00</b>

URAIAN	REF	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
<b>TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN</b>					
Bagi Hasil Pajak ke Desa	5.1.3.1	4.734.657.198,00	-	-	4.747.545.725,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	5.1.3.2	356.472.802,00	-	-	499.327.250,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.3	313.799.046.400,00	305.854.767.508,00	97,47	307.190.473.500,00
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>318.890.176.400,00</b>	<b>305.854.767.508,00</b>	<b>95,91</b>	<b>312.437.346.475,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>352.231.713.606,00</b>	<b>331.862.877.808,00</b>	<b>94,22</b>	<b>334.287.713.353,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>1.637.303.554.802,00</b>	<b>1.537.902.001.085,13</b>	<b>93,93</b>	<b>1.595.836.059.618,65</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan SILPA	5.1.4.1	397.000.000.000,00	162.263.868.113,04	40,87	170.093.406.045,47
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.1.4.2	-	129.132.972,00	-	254.111.994,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>397.000.000.000,00</b>	<b>162.393.001.085,04</b>	<b>40,91</b>	<b>170.347.518.039,47</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.3	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>397.000.000.000,00</b>	<b>162.393.001.085,04</b>	<b>40,91</b>	<b>170.347.518.039,47</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	5.1.5	<b>2.034.303.554.802,00</b>	<b>1.700.295.002.170,17</b>	<b>83,58</b>	<b>1.766.183.577.658,12</b>

Tembilahan, 31 Desember 2024  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

  
**MURRAHMAN, SE**  
NIP. 19790223 199905 1 001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Penekanan Suatu Hal**

BPK menekankan pada Catatan 5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan. Hal tersebut menimbulkan kewajiban jangka pendek diantaranya berupa Utang Belanja sebesar Rp88.036.612.607,09 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

### **Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Riau**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

  
  
**Mas Agung M. Noor, S.ST., MSi., Ak., CA, CFE, CSFA**  
**Register Negara Akuntan No. D-27.373**